



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019**



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(LPPD)

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2019

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan *good governance*.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua, serta semoga seluruh upaya yang dilaksanakan senantiasa mendapat perlindungan, kekuatan, petunjuk, dan ridha Allah SWT.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pangkalpinang, April 2020
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

	pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.	memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota			
--	--	--	--	--	--

4.3.5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan pekerjaan umum tahun 2019, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator SPM	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	2 orang
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	2 orang

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum ini yaitu bahwa belum adanya SPAM regional dan SPALD regional yang terbangun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga untuk pencapaian target ini sulit direalisasikan. Langkah-langkah yang ditempuh sebagai solusi Perangkat Daerah yang membidangi urusan ini akan berkonsultasi ke kementerian teknis yang membidangi urusan tersebut dan juga pada Tahun Anggaran 2020 ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kepulauan Bangka Belitung akan membuat Kegiatan Pengumpulan data agregasi Kab/Kota pengolahan data SPM bidang air minum dan air limbah.

4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat (Dinas Perkim)

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan perumahan rakyat antara lain:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang

	Pemerintah Daerah provinsi	memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni
--	----------------------------	---

4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berikut ini disampaikan target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Persentase
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	276 orang	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	n.a	n.a

4.4.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Persentase
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	276 Unit	100 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	n.a	n.a

4.4.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM perumahan rakyat.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran		
			APBN (Rp)	APBD (Rp)	Lain-lain
1.	Penyediaan dan rehabilitasi	Jumlah Warga Negara korban	-	4.107.302.500	-

	rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	bencana yang memperoleh rumah layak huni			
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	-

4.4.5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan perumahan rakyat tahun 2019, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Dukungan Personil
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	5 orang
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	5 orang

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM ini khususnya untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena realokasi program pemerintah daerah provinsi adalah belum adanya program pemerintah provinsi untuk kegiatan ini yang mengakibatkan adanya masyarakat yang terkena relokasi. Sehingga untuk penerapan SPM ini di Tahun 2021 direncanakan kegiatan pendataan dan inventarisasi rumah layak huni yang terkena program pemerintah dan rumah tidak layak huni daerah yang potensi rawan bencana.